



Kebijakan Pupuk Bersubsidi:

Isu tentang Distribusi Pupuk & Implementasi Kartu Tani

Anggaran pupuk bersubsidi cenderung naik, namun produksi & tingkat produktivitas sektor pertanian justru menurun atau stagnan. Apakah kebijakan pupuk bersubsidi efektif? Bagaimana dampak penyaluran pupuk bersubsidi & implementasi Kartu Tani terhadap perekonomian, produksi, & pendapatan petani?

Metode



Pendekatan kualitatif deskriptif & Model CGE

MARET-MEI 2021

Lokasi sampel: Jawa Timur & Bali

Isu Distribusi Pupuk dan Implementasi Kartu Tani

Hulu



Antara



Hilir

- Daya saing pupuk rendah
- HET pupuk bersubsidi tidak dimutakhirkan
- Data e-RDKK valid perlu dukungan PPL
- Verifikasi luas lahan belum dilakukan pihak profesional
- Responsitas pemda memengaruhi penyaluran pupuk bersubsidi
- Penetapan distributor/kios tani perlu aturan tertentu
- Moral hazard karena celah harga pupuk bersubsidi vs nonsubsidi besar
- Implementasi Kartu Tani menemui tantangan besar

Dampak Kebijakan Pupuk Bersubsidi

- Berdampak positif terhadap PDB Indonesia
- Berdampak positif terhadap sektor pertanian, khususnya perkebunan, hortikultura, & tanaman pangan
- Benefit kebijakan pupuk bersubsidi lebih banyak dinikmati rumah tangga perkotaan "golongan atas" dibandingkan rumah tangga petani

Kesimpulan

- Penyaluran pupuk bersubsidi & implementasi Kartu Tani masih ditemukan kelemahan & penyimpangan dari di sisi hulu, antara, hingga hilir
- Saat ini, kebijakan pupuk bersubsidi masih dibutuhkan karena berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, meningkatkan produksi sektor pertanian, & meningkatkan pendapatan petani. Opsi-opsi kebijakan berdasarkan simulasi memerlukan catatan yang menyertainya, yaitu penyaluran pupuk bersubsidi harus dijalankan dengan 6 tepat & dilengkapi dengan kebijakan lainnya, seperti kebijakan harga dasar gabah

